



Rp 193,680 /malam

Rp 217,835 /malam

Rp 134,460 /malam

Rp 198,990 /malam



Butuh Pilkada yang Mendidik Anti Korupsi

Published on Monday, 16 April 2018 20:51



Sebagian elemen rakyat berharap besar pesta demokrasi tingkat lokal yang dikenal dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan sebentar lagi digelar di sejumlah daerah, dapat menjadi momentum mendidik rakyat untuk melawan (menangkal) korupsi. Mengapa rakyat berharap demikian? Pilkada merupakan momentum menggerakkan segala kekuatan baik yang bersumber dari kandidat maupun rakyat (pemilih). Dalam pengerahan segala kekuatan ini ditakutkan penyakit lama yang berkenaan dengan politik uang dan berbagai bentuk penyalahgunaan uang tetap saja berulang.

Jika seperti itu yang terus terjadi atau "diamini" (disetujui) oleh masyarakat untuk tetap berlaku, maka Pilkada yang diselenggarakan ini, tidak akan membuahkan pendidikan moral berpolitik yang baik. Masyarakat hanya akan mengenal dan "menyepakati" tradisi politik yang sesat jalan.

Para penyelenggara atau pemilik kedaulatan di negeri ini harus membaca dengan nalar, bahwa ada bermacam-macam potret manusia, mulai dari

sudut ras, etnis, agama, politik, primordial, hingga ke strata sosial dan ekonomi, yang mereka ini dalam membangun keberagaman bermacam-macam.

Ada seseorang atau sekelompok orang yang menyeraskan perbuatannya dengan norma agama dan moral, namun ada pula yang memilih jalur paradoksal dengan moral, agama, dan hukum. Diantara seseorang dan sekelompok orang yang menempuh jalur paradoksal dengan norma hukum adalah para koruptor. Mereka memilih jalur yang berlawanan dengan norma yuridis untuk memenuhi atau memuaskan kepentingan-kepentingan eksklusif dan monologosnya.

Filosof terkemuka Aristoteles pernah mengingatkan, bahwa semakin tinggi penghargaan seseorang terhadap kekayaan (uang), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap kesucilaan, kemanusiaan, kejujuran, dan kebenaran. Apa disampaikan Aristoteles setidaknya dapat terbaca pada berjumlah elitis politik yang tercatat "sukses" meraih kursi kepemimpinan dan berhasil menikmati dengan ditandai berlimpahnya kekayaan dan deretan mobil mewah, yang kemudian tiba-tiba "digiring" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau menyalahgunakan penggunaan APBD.

Sudah demikian sering kita baca juga selama ini, bahwa mereka yang terlibat korupsi adalah sekelompok orang yang menyusahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini. Mereka tidak peduli tentang kondisi sebagian rakyat yang masih terhimpit ketidakberdayaan di sejumlah sektor strategis.

Mereka (koruptor) terus mengisi ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini, termasuk dalam ranah perpolitikan. Mereka hadir sebagai penyakit yang membuat bangsa ini semakin populer disebut negeri yang akrab dengan sepak terjang berpola korupsi, sehingga negeri identik sebagai organisasi yang sarat manusia-manusia berpenyakit mental.

Fakta dari waktu ke waktu memprihatinkan yang menunjukkan, bahwa bangunan bangsa ini dipilari oleh komunitas elite yang rentan sekali "terciduk" oleh praktik-praktik tidak suci dan tak punya komitmen kuat untuk membela, memperjuangkan, dan menjaga citra bangsa, sebaliknya menjadi elitis yang suka menyebarkan penyakit-penyakit kekuasaan. Bilamana mereka itu memang elitis yang amanat, tentulah yang sudah menduduki jabatan tinggi dengan gaji besar dan dukungan pemanfaatan fasilitas negara yang mewah, tidak akan sampai terjerumus dalam malpraktik kekuasaan. Sayangnya, elemen kekuasaan yang tentu saja dari individu terdidik itu tak benar-benar menunjukkan tanggungjawabnya sebagai penyangga, penghidup dan pencerah negeri ini. Mereka nekad bermain-main dengan pengeliminasian amanat kekuasaannya

Bagaimana mungkin mereka bisa ikut mengantarkan Indonesia ke era kemakmuran dan keadilan sosial, khususnya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi (pilkada) anti korupsi, kalau sikap dan perilaku yang ditunjukkan masih menoleransi praktik "pengulturan" politik uang, yang nota bene juga korupsi gmn merebut kekuasaan (misalnya sebagai gubernur, wakil gubernur, walikota/bupati dan seterusnya).

Tidak sedikit diantara mereka itu yang belum mau bercerai dengan praktik-praktik deviasi etik. Mereka masih gampang menyerah pada praktik pengingkaran nilai. Mereka berada dalam ranah keterperangkapan mensupremasikan perilaku kriminalisasi dan tak terpujinya yang secara langsung atau tidak langsung "diteladankan" dan dijadikan "viralisasi" pada masyarakat.

Dalam pilkada yang sering dikulturisasikan adalah misalnya membelokkan istilah "memberi" kepada masyarakat atau calon pemilih dengan barang atau uang dengan kosakata "pembinaan", "bentuk perhatian", dan pola-pola yang ditajukkan sebagai "karitas", padahal yang membuat kaburnya pemaknaan antara politik uang dengan kedemawanan politik.

Kalau memang pilkada mau dijadikan momentum pendidikan anti korupsi secara riil, maka perilaku yang digelar komunitas elitis dari penyelenggara pilkada atau siapapun yang "bermain" dalam menyukceskan misi mulia pilkada terkait bangunan demokrasi, seharusnya lebih menyuratkan gerakan etis.

Mereka juga harus gencar tunjukkan kemuliaan pribadi sebagai pilar demokrasi, pasalnya mereka adalah sumber keteladanan moral, kultural, dan struktural. Kalau elitisnya jelek, dampak berdampak makro terhadap rakyat pastilah bertambah mengerikan.

Kalau mereka tidak serius membangun pilkada yang bersih, maka potret negeri ini akhirnya benar-benar seperti wilayah tak berpayung hukum, tak punya pemimpin, tak ada tatanan, dan dilanda krisis jiwa kenegarawanan, pasalnya yang dipercaya menjadi negarawan di penyelenggaraan pilkada, ternyata lebih menyukai terseret dalam arus penyelingkungan nilai-nilai kebenaran.

Dampak meluasnya, stigma jelek menjadi logis, bahwa komunitas elite strategis yang membawa baju sebagai nahkoda pilkada itu telah menjadikan negeri ini tak ubahnya ladang bebas dan sangat basah untuk berburu keuntungan sebanyak-banyaknya, dan bukan menjadikan pilkada sebagai momentum membangun mental rakyat yang anti korupsi. (*)

Oleh Fanny Tanuwijaya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
dan penulis sejumlah buku tentang Korupsi

ePaper Malang Post



Search...



Baca Juga

**Galaxy Tab A, Fasilitas S-Pen Istimewa**[Baca Selengkapnya](#)**Digital Tourism, Trend Baru Berwisata**[Baca Selengkapnya](#)**Andalkan Ayam Geprek dalam Kemasan Kekinian**[Baca Selengkapnya](#)**Berani Bersaing dengan Harga Terjangkau**[Baca Selengkapnya](#)**Datsun Cross Primadona Baru**[Baca Selengkapnya](#)**Desy Miladiana, Penulis Novel di Whattpad dengan S...**[Baca Selengkapnya](#)

Biznet Home Internet
30 Mbps Rp 280,000/bulan.
#PakeBiznet



Copyright@joombig.com

FREE Web Monitoring



Rp 181...

Airy Eco Pasteur
Cipedes Tengah
195 Bandung